

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan peluang pada desa untuk dapat membangun desa dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa. Tujuannya agar desa dapat menjadi bagian dari proses pembangunan nasional dan memiliki pendapatan sendiri. Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan dapat dimanfaatkan sebagai pedoman pemerintah desa yang lainnya dalam mendirikan serta mengelola BUMDes yang baik sesuai dengan peraturan perundangan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini diawali dengan analisis kesesuaian pembentukan BUMDes dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesesuaian pengelolaan BUMDes dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris, dengan metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan literatur kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kemendagri No 39 Tahun 2010 tentang BUMDes, Perda Temanggung No. 3 Tahun 2016, Perdes No 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan BUMDes Mitra Sejahtera, dan AD/ART BUMDes Mitra Sejahtera. Analisa data menggunakan reduksi data, penyajian, dan verifikasi data.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses pembentukan BUMDes Mitra Sejahtera sebagian besar telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hanya saja pengelolaannya masih belum baik dan masih banyak yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Meski demikian dengan keberadaan BUMDes Mitra Sejahtera ini telah memiliki pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, meskipun belum secara signifikan dan menyeluruh.

Kata Kunci : *Arti Penting, BUMDes, Kesejahteraan.*

ABSTRACT

Law No. 6 of 2014 on Villages provides opportunities for villages to be able to build villages by establishing Village Owned Enterprises. The goal is that the village can be part of the national development process and have its own income. This research is carried out in the hope that it can be used as other village government guidelines in establishing and managing good BUMDes in accordance with the laws and regulations in order to improve the welfare of the village community. This research begins with an analysis of the suitability of the establishment of Village Owned Enterprises with applicable laws and regulations, the suitability of Village Owned Enterprises management with applicable laws and regulations, and the role of Village Owned Enterprises in improving community welfare.

This research uses qualitative research methods with empirical approaches, with data collection methods are observation, interviews, documentation, and literature. The data obtained were analyzed using Law No. 6 of 2014 on Villages, Ministry of Home Affairs No. 39 of 2010 on Village Owned Enterprises, Regional Regulation of Temanggung No. 3 of 2016 on Village Owned Enterprises, Village Regulation No. 5 of 2020 on The Establishment of BUMDes Mitra Sejahtera, and Statutes and bylaws of BUMDes Mitra Sejahtera. Data analysis using data reduction, presentation, and verification of data.

The results of this study indicate that the process of establishing BUMDes Mitra Sejahtera has largely followed the laws and regulations. It's just that the management is still not good and there are still many things that are not in accordance with the laws and regulations. However, the existence of BUMDes Mitra Sejahtera has influenced improving the welfare of the community, even though it has not been significant and comprehensive.

Keywords : Importance, BUMDes, Welfare